

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa formulasi kebijakan adalah proses yang paling penting karena implementasi dan evaluasi dapat terjadi jika proses kebijakan formulasi sudah diterapkan. Proses formulasi kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang sudah ada, kegagalan yang muncul dalam suatu program untuk mencapai suatu kebijakan bersumber dari ketidaksempurnaan proses kebijakan formulasi tersebut.

1. Dalam proses formulasi kebijakan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu proses perumusan masalah kebijakan yaitu ketika masalah diangkat kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menemukan identitas isu masalah tersebut. Perda tentang penyelenggaraan perlindungan anak di buat berdasarkan usulan dari masyarakat, tokoh masyarakat dan dinas terkait yang merasa tidak nyaman dengan adanya kejadian kekerasan terhadap anak yang terus berulang kali tanpa ada resolusi yang signifikan.
2. Penyusunan agenda bisa dilihat dari berbagai banyaknya masalah yang muncul tetapi hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pada tahap penyusunan agenda pemerintah di DPRD Kota Batam sudah maksimal dalam melakukan penyusunan agenda pemerintah, dimana Pemerintah

kota dan DPRD sebagai lembaga yang menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat segera melakukan pengkajian dan memproses agenda kebijakan tersebut layak atau tidaknya untuk dibuat ranperda lalu memprosesnya menjadi perda di kota Batam.

3. Pemilihan alternatif pembuat kebijakan yakni mengembangkan dan menyusun serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan sebuah isu atau masalah kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada tahapan pemilihan alternatif kebijakan di DPRD kota Batam seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*, dimana kebijakan tidak boleh menutupi tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan *stakeholders*.
4. Pengesahan kebijakan adalah langkah penerimaan dan penyesuaian bersama terhadap prinsip yang diterima dan yang diakui. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada proses pengesahan kebijakan di DPRD kota Batam adalah kebijakan yang diawali dengan kegiatan *persuasion* dan *bargaining*. Dimana *persuasion* di definisikan sebagai upaya untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan seorang sehingga mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri dan *bargaining* dapat diartikan suatu proses dua orang atau lebih mempunyai otoritas dan kekuasaan untuk menyesuaikan atau mengatur sebagai tujuan yang tidak disepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama. Yang termasuk ke dalam kategori

bargaining adalah perjanjian (*negotiation*), saling memberi dan menerima (*take and give*) dan kompromi (*compromise*). Baik persuasione maupun bargaining, kedua-duanya saling melengkapi sehingga penerapan kedua kegiatan atau proses tersebut akan dapat mempercepat proses pengesahan kebijakan.

5.2 Saran

Sebagai seorang peneliti, saya menyarankan agar kebijakan pendidikan berakar pada semua masalah pendidikan yang dikeluhkan masyarakat umum. Dengan terbentuknya suatu kebijakan, kami berharap masyarakat akan menjadi lebih baik di belakang kebijakan yang telah dibuat. Saran peneliti yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan sebaiknya dilandasi oleh sikap keadilan, tidak ada yang merasa di rugikan dibalik kejadian tersebut dan di beri sanksi yang tegas.
2. Pembuat kebijakan, baik legislatif dan eksekutif, harus selalu membuka komunikasi terkait sebelum mengembangkan dan menyusun kebijakan publik sehingga tidak terlalu banyak perdebatan di kemudian hari dalam diskusi.
3. Para pembuat kebijakan juga harus melibatkan masyarakat sehingga kebijakan yang dikembangkan tidak bertentangan dengan norma dan budaya yang lazim di masyarakat. Badan legislatif dalam hal ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang harus selalu memberikan prioritas pada masyarakat, bahkan jika dipimpin oleh partai politik yang tentu saja memiliki ideologi masing-masing. Ini dapat dilakukan dengan membuka

komunikasi langsung antara anggota dewan dan orang-orang dalam pertemuan mereka masing-masing. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan formulasi kebijakan publik agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi dan dapat melengkapi penelitian saat ini.